

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017- 2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel.3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel.3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 050/010/DPMPTSP/2020, Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Investasi Daerah	1. Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rupiah (Milyar)	250.000.000.000	295.801.400.000	118,32
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,75	85	100,30

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentasi dari capaian indikator 1 (satu) realisasinya melebihi 100 % yaitu 118,32%, dan indikator 2 (dua) persentasi capaiannya juga melebihi 100 % yaitu 100,29%

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Berdasarkan Persentase Tahun 2020**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	2

Berdasarkan tabel di atas di ketahui :

1. 0 (nol) indikator tidak mencapai target (kurang dari 100 %)
2. 0 (nol) indikator sesuai target (100 %)
3. 2 (dua) indikator melampaui target (lebih dari 100 %)

Capaian indikator berdasarkan klasifikasi kategori dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Kategori Tahun 2020**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) jumlah indikator utama yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan katagori sangat baik karena berada pada capaian > 90.

**Tabel 3.1.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020**

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	118,32 %	Melebihi Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	100,3 %	Melebihi Target

Pada tabel diatas diketahui bahwa terdapat :

1. 0 (nol) sasaran strategis tidak mencapai target
2. 0 (nol) sasaran strategis sesuai target; dan
3. 2 (dua) sasaran strategis melebihi target

**Tabel 3.1.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Berdasarkan Kategori Tahun 2020**

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	0 - 49,99 Sangat Kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	>90 Sangat Baik
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	118,32					118,32
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	100,30					100,30

**Tabel 3.1.6**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
		Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target(<100)	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	1	118,32				

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	1	100,30				
---	---	---	--------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, capaian target sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 masuk dalam kategori sangat baik.

### **3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Sesuai ketentuan tersebut, Pelaporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 050/010/DPMPTSP/2020, Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rencana Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/243/KUM/2018, Tanggal 4 Juni 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Barito Kuala yaitu 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan rincian sebagai berikut :

### **1) SASARAN STRATEGIS 1**

#### **MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH (PMDN/PMA)**

Sasaran “Meningkatnya Investasi Daerah” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian MISI 2 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian,” pada sasaran strategis ke 5, yaitu “Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal,” dengan indikator “ Pertumbuhan ekonomi”.

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan indikator “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)”.

Nilai investasi daerah (PMDN/PMA) dirilis berdasarkan laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setiap akhir tahun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan yang di laporkan oleh perusahaan pertriwulan secara online dan harus sinkron antara data provinsi dan daerah dengan persetujuan dari BKPM Pusat.

Jadi “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)” adalah capaian realisasi investasi di daerah berupa Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing pada tahun berjalan yang dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan formulasi perhitungan :

Hasil rilis BKPM berdasarkan laporan capaian realisasi investasi tahun berjalan

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2020

Indikator Kinerja Utama “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)” berdasarkan Renstra 2017-2022, pada Tahun 2020 ditargetkan 250 M berdasarkan usulan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

Maka capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 118,32 %  $(295.801.400.000 / 250.000.000.000 \times 100)$  Terlampir Laporan BKPM Pusat.

**Tabel 3.2.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	250 M	295.801.400.000	118,32

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) Tahun 2020 dibanding tahun lalu, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2019	%
Meningkatnya Investasi Daerah (PMDM/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	295.801.400.000	331.501.600.000	89,23

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2020-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 dan Sasaran Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**2017-2022**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	4.912.756	250.000.000	295.801.400.000	118,32	1.255.000.000	90,38

3. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Untuk target kinerja pada tahun 2020 telah diajukan perubahan target kinerja IKU melalui Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kab. Barito Kuala Nomor: 050/017.1/DPMPTSP/2020 tentang Hasil Reviu Ketiga Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/Kum/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala karena adanya kondisi pandemi covid-19 yang berdampak secara langsung terhadap perekonomian di Indonesia dan oleh BKPM telah menetapkan penurunan target nilai investasi di Indonesia, berdasarkan hal tersebut dan adanya pemotongan anggaran pada SKPD, maka pemerintah daerah melalui Dinas PMPTSP mengajukan usulan penurunan target Nilai Investasi untuk tahun 2020 dan tahun selanjutnya dengan melihat perkembangan kondisi di Indonesia.

Tercapainya target kinerja melalui peningkatan kinerja pada tahun 2020 juga dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran dari pelaku usaha untuk lebih kontinyu dan konsisten melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan/usaha dan kemudahan dalam proses perizinannya.

#### 4. Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 sebesar Rp. 191.718.370.- telah terealisasi Rp. 176.256.530.- ( 91,94 % ).

Sehingga terdapat efisiensi sebesar 8.06 % ( 100 % - 91,94 % )

**Tabel 3.2.3**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkat nya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	(>100%)	91,94	8,06

5. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) yaitu “Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)” dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)”, dituangkan dalam :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal, yaitu : pembuatan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan dalam pengembangan investasi di daerah dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (1 buah dokumen Perencanaan Penanaman Modal)

- b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, yaitu : melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (Jumlah investor yang merealisasikan rencana investasi sebanyak 14 investor)
- c. Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah, yaitu : melakukan penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (Jumlah kerjasama investasi sebanyak 2 investor)
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan penanaman modal dalam rangka pembinaan dalam kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (Jumlah perusahaan yang termonitor sebanyak 20 perusahaan).
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan :
- Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal yaitu kegiatan dalam rangka pendampingan permohonan izin oleh masyarakat/pengusaha melalui Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*) dengan pencapaian realisasi fisik sebesar

100 persen (Jumlah pendampingan penerbitan izin  
Penanaman Modal sebanyak 17 kali)

Terjadinya peningkatan/ penurunan nilai investasi dapat  
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Pelaku usaha tidak kontinue dan konsisten menyampaikan LKPM
2. Ketergantungan sumber pengolahan data dan informasi pada database BKPM
3. Keterbatasan akses database BKPM untuk inventarisasi data yang lebih rinci (masterdata)

Tantangan-tantangan yang harus jadi perhatian dan dilaksanakan  
kedepannya :

1. Meningkatkan perhatian dan partisipasi/kesadaran dari pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM
2. Meningkatkan informasi dari media massa
3. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam teknis penyampaian LKPM

Peluang :

1. Investasi di Kabupaten Barito Kuala masih ada peluang proyek para investor di antaranya pelabuhan, bongkar muat, galangan kapal (docking), developer/property
2. Adanya dukungan pemerintah kepada pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Barito Kuala melalui kemudahan proses perizinan dan fasilitasi/pemberian insentif

## **2) SASARAN STRATEGIS 2**

### **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN**

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian MISI ke-2 (kedua) RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian,” pada sasaran strategis ke- 5, yaitu “Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal,” dengan indikator “ Pertumbuhan ekonomi”.

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan dengan formulasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{NRR Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 25$$

Unsur

Keterangan :  
NRR = Nilai Rata-rata  
25 = Nilai Indeks

Untuk mendapatkan nilai IKM tool/alat yang digunakan adalah dengan melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna jasa pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala (masyarakat pemohon perizinan dan ke kecamatan yang pernah mengurus izin) dengan tujuan untuk mengukur tingkat kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, dengan melakukan penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dan pengaduan, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta.

Metode Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara tetap setiap 1 (satu) tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah

diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam survei ini adalah pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert* , yaitu skala psikometrik dengan menggunakan kuisioner (angket) seperti **terlampir** melalui kegiatan survei yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi Nilai. Sedangkan pengolahan dan analisis hasil survei mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai kaidah pengolahan survei. Surat Keputusan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SOP Survey Kepuasan Masyarakat **terlampir**.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka jumlah sampel Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 384 orang responden (384 lembar kuisioner), berdasarkan perhitungan jumlah minimal Responden dari total jumlah penduduk.

Perhitungan Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan SKM terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur memiliki rumus penimbang.

Unsur-unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur yaitu :

1. Kesesuaian Persyaratan

2. Kemudahan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Pelayanan
4. Kewajaran Biaya/Tarif
5. Kesesuaian Produk Layanan
6. Kompetensi Petugas
7. Perilaku Petugas
8. Kualitas Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat didapat nilai indeks 85 termasuk dalam Nilai Internal Konversi (NIK) 76,61 – 88,30 dikategorikan dengan Mutu Pelayanan B, bahwa Kinerja Unit Pelayanan adalah **BAIK** dan unsur Pelayanan yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah Kewajaran Biaya/Tarif, sedangkan yang terendah adalah unsur Kecepatan Waktu Pelayanan.

Deskripsi Hasil Survey Unsur-Unsur sebagai berikut :

#### 1. Unsur Kesesuaian Persyaratan

Bahwa nilai survey tahun 2020 (3,27) lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai survey tahun 2019 (3,30) hal ini dikarenakan masyarakat/pemohon sebelum mengajukan permohonan tidak mencari informasi terlebih dahulu persyaratan yang diperlukan dan belum optimalnya informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat.

#### 2. Unsur Kemudahan Prosedur

Dari nilai survey tahun 2020 (3,30) Kemudahan Prosedur mempunyai nilai yang sedikit lebih rendah di bandingkan dengan

tahun 2019 (3,34) , namun hal ini tidak signifikan karena sudah ada beberapa jenis perizinan yang prosedurnya di sederhanakan dan juga telah di buatkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

### 3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari nilai survey tahun 2020 (3,18), Kecepatan Waktu pelayanan mempunyai nilai sedikit lebih rendah di dibandingkan tahun 2019 (3,20), hal ini di karenakan dampak dari masa pandemi covid-19 dimana jumlah petugas yang bertugas diadakan pengurangan untuk memenuhi protokol kesehatan dalam menjaga jarak dan ruang, namun lama waktu pelayanan masih sesuai SOP.

### 4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif

Bahwa dari nilai survey tahun 2020 (3,84) unsur Kewajaran Biaya/Tarif mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 (3,64) karena dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dikenakan biaya/tarif (gratis). Hal ini perlu terus diperhatikan agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan terbuka tentang biaya/tarif ini.

### 5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Bahwa dari nilai survey tahun 2020 (3,26) unsur Kesesuaian Produk Layanan mempunyai nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tahun 2019 (3,25), kemungkinan ada masyarakat sudah mulai paham dan mendapat informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan-perizinan yang baru seperti jenis layanan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha merupakan jenis

layanan produk baru di tahun 2019, sejak ditetapkannya PP 24 Tahun 2019.

#### 6. Unsur Kompetensi Petugas

Bahwa dari nilai survey tahun 2020 (3,29) unsur Kompetensi Petugas mempunyai nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tahun 2019 (3,28), hal ini dimungkinkan dengan adanya peningkatan kompetensi petugas melalui berbagai bimbingan teknis baik yang diikuti secara offline dan online dalam pelayanan berbagai produk maupun memproses produk perizinan yang baru (NIB) dengan mekanisme dan prosedur yang baru dengan ditetapkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka untuk memproses NIB harus melalui aplikasi OSS (one submit system), sehingga perlu kompetensi yang baik tentang penerapan sistem OSS ini baik bagi pengusaha maupun petugas/aparat.

#### 7. Unsur Perilaku Petugas

Bahwa nilai survey tahun 2020 (3,40) unsur Perilaku Petugas Layanan menurun sedikit lebih rendah dari nilai tahun 2019 (3,42). Dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk semua jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala telah membuat komitmen untuk terus melakukan peningkatan pelayanan terhadap pemohon perizinan, untuk itu perilaku petugas senantiasa harus bersikap sopan, santun dan lembut/ramah, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap instansi pemberi izin, sehingga

terus meningkatkan nilai kepuasan masyarakat di masa yang akan datang

#### 8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Bahwa nilai survey tahun 2020 (3,28) unsur Kualitas Sarana dan Prasarana sedikit menurun bila dibandingkan dengan Kualitas Sarana dan Prasarana tahun 2019 (3,30). Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan sarana prasarana berupa komputer untuk aplikasi OSS dan juga terbatasnya petugas pendamping aplikasi OSS yang langsung mengajukan permohonan secara offline sebenarnya pemohon dapat membuat pengajuan perizinan dari lokasi mereka sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga.

#### 9. Unsur Penanganan Pengaduan

Bahwa nilai survey tahun 2020 (3,82) unsur Penanganan Pengaduan jauh meningkat dari tahun 2019 (3,69). Unsur Penanganan Pengaduan ini merupakan salah satu unsur yang paling banyak memberi kontribusi terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun ini telah disediakan blanko pengaduan manual, kotak saran, kritik dan ditempatkan di ruang tunggu apabila masyarakat ingin menyampaikan keluhan, pengaduan, saran dan kritik dalam pelayanan perizinan, sebagai tindak lanjut dari masukan Ombudsman perwakilan Kalimantan Selatan. Begitu pula hal tersebut dapat disampaikan melalui media elektronik/website DMPTSP ([lapor.go.id](http://lapor.go.id)) dan media sosial, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai sarana pengaduan, saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan.

Capaian kinerja IKU IKM dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2020

Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2020 ditargetkan 84,75 . Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Barito Kuala untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 85 atau 100,30 % ( $85/84,75 \times 100$ )

**Tabel 3.2.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75	85	100,30

Capaian indikator sasaran 2 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 100,30 persen hal ini didukung oleh :

1. Program Peningkatan pelayanan Publik dengan kegiatan :
  - a. Pendataan Perizinan dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (Jumlah perizinan yang terdata sebanyak 2218 izin /12 dokumen)
  - b. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (Jumlah responden yang disurvei sebanyak 384 responden)

- c. Monitoring dan Evaluasi Perizinan dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (Jumlah pelaku usaha yang taat aturan/Non PM sebanyak 12 pelaku usaha)
- d. Sosialisasi Perizinan dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100 persen (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 17 kali)
- e. Pemeriksaan dan Pengecekan Lapangan Pemohon Perizinan realisasi sebesar 100 persen (Jumlah survey yang dilaksanakan dilaporkan dalam 12 laporan dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 1339 berkas)

Capaian indikator sasaran ke-2 Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.

Untuk melihat capaian sasaran strategis 1 meningkatnya investasi daerah (PMDN/PMA) dan sasaran strategis 2 meningkatnya kualitas pelayanan perijinan maka ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Keberhasilan capaian indikator sasaran 1 Nilai Investasi Daerah dan capaian indikator sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan oleh tercapainya target program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2020. Keberhasilan capaian indikator diharapkan dapat dipertahankan melalui penguatan program-program utama.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dibanding dengan kondisi tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020	Kondisi Tahun 2019	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	84,01	101,18

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2020-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 dan Sasaran Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**2020-2022**

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	84,75	85	100,30	84,99	100,01

4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Tercapainya target yang didapat karena masyarakat pengguna layanan perizinan dan layanan penanaman modal mendapatkan pelayanan yang baik yang didukung melalui beberapa kegiatan melalui program Peningkatan Pelayanan Publik sebagai berikut :

Secara garis besar bahwa pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan sudah menuju ke pelayanan modal dan pelayanan perizinan yang sesuai standar pelayanan melalui peningkatan kompetensi SDM, melengkapi dan melakukan reviu secara rutin terhadap SOP Perizinan hampir di semua jenis pelayanan , penerapan Sistem Kerja Berbasis IT (Informasi Teknologi) pada pelayanan perizinan untuk kemudahan pelayanan, telah membuat dokumen Rencana Umum Penanaman Modal sebagai salah satu acuan dalam data peluang investasi , pelayanan Konsultasi dan Aduan masyarakat, dalam hal pengelolaan informasi data masih perlu ditingkatkan karena masih dilakukan secara manual, namun dilihat dari sisi investor adalah masih kurangnya kesadaran dalam hal pelaporan perkembangan usaha/investasinya.

Kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dapat dilihat secara lebih detail sebagai berikut :

- 1) Secara rutin melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan- perusahaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, kegiatan ini bersifat memastikan seluruh perusahaan yang beraktifitas di Kabupaten Barito

Kuala sanggup mengikuti peraturan yang berlaku seperti pembinaan UMKM

- 2) Secara rutin memfasilitasi promosi potensi-potensi Kabupaten Barito Kuala melalui pameran kabupaten, aktif mengikuti pameran provinsi dan nasional
- 3) Memfasilitasi pelayanan prosedur perijinan (menyederhanakan prosedur/memangkas birokrasi, mempersingkat waktu penyelesaian secara rasional, tetap disiplin administrasi) melalui peningkatan kapasitas petugas (mengadakan pelatihan), mendampingi pelayanan di seluruh kecamatan (pro aktif) dan memberikan pelatihan singkat pada petugas kecamatan yang berminat mempelajari OSS (*Online Single Submission*)
- 4) Secara rutin melakukan sosialisasi perijinan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala (memberikan banner tentang perijinan, mengundang masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi terkait dengan pembuatan perijinan yang gratis, mudah dan cepat)
- 5) Melakukan survey lokasi para pemohon perijinan guna memastikan ketepatan pengelolaan lokasi yang dimohonkan dan menjamin keamanan berusaha dengan mempertimbangkan RTRW yang berlaku di Kabupaten Barito Kuala. Survey dilakukan oleh tim teknis yang terkait dengan usaha yang diusulkan (tim teknis berasal dari SKPD terkait seperti PUPR, Disperkim, Disbunak,

Disdik, Dinas Kesehatan, Dishub, Dinas Pertanian, BP2RD, Satpol PP, DLH, Bidang Hukum Pemda, Kantor Pertanahan dll)

- 6) Menerapkan teknologi informasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI no. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Aplikasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai saat ini dan tersedianya e signature untuk mempercepat pengesahan dokumen perizinan sejak bulan Oktober 2020
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke perusahaan dalam rangka peningkatan investasi dengan memberikan bimbingan untuk melaporkan secara rutin kegiatan penanaman modal (LKPM).
- 8) Melaksanakan secara rutin monitoring dan evaluasi perizinan kepada pelaku usaha yang diberikan izin apakah telah mematuhi sesuai izin yang diberikan
- 9) Menanggapi (menjawab) pengaduan yang masuk sesuai SOP dan masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui [lapor.go.id](https://lapor.go.id) dan melalui media sosial (IG, WA)
- 10) Secara rutin melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat UU No. 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM.

- 11) Secara rutin melaksanakan pendataan perizinan baik perizinan umum dan perizinan penanaman modal sebagai bahan/acuan dalam pengembangan investasi bagi calon investor
- 12) Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 sebesar Rp. 148.308.505.- telah terealisasi Rp. 145.501.030.- ( 98,11 %) sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,89 % ( 100 % - 98,11 % )

**Tabel 3.2.6**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(>100%)	98,11	1,89

5. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” dengan Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dituangkan dalam :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik

dengan kegiatan :

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu : melakukan evaluasi terhadap tingkat kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat/pemohon perizinan melalui survey kepuasan masyarakat (kuisisioner).
- b. Monitoring dan Evaluasi Perizinan, yaitu : melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses perizinan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta atas hasil survey indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan
- c. Pendataan Perizinan yaitu: melakukan updating data perizinan yang dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan evaluasi monitoring dan lain-lainnya dalam proses perizinan
- d. Sosialisasi Perizinan, yaitu ; melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai hal dalam proses perizinan (prosedur/tata cara, jenis perizinan, tata waktu , dll)
- e. Pemeriksaan dan Pengecekan lapangan Pemohon Perizinan, yaitu : melaksanakan salah satu tahapan dalam proses

penerbitan izin dengan melaksanakan verifikasi lapangan pemohon izin.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.058.053.787.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.972.956.997.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,22 %.

Komposisi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Komposisi Belanja Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Belanja Langsung	780.859.084.-	738.151.247.-	94,53
<b>2</b>	Belanja Tidak Langsung	2.277.194.703.-	2.234.805.750.-	98,14
	<b>Jumlah</b>	<b>3.058.053.787.-</b>	<b>2.972.956.997.-</b>	<b>97,22</b>

*Sumber RFK dan DPA Perubahan Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi belanja langsung sebesar 94,53 % terhadap realisasi belanja DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 98,14 %.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 780.859.084.- dengan realisasi sebesar Rp. 738.151.247.- atau 94,53 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1	191.718.370.-	176.256.530.-	91,94
2	Sasaran 2	148.308.685.-	145.501.030.-	98,11
	Jumlah	340.027.055.-	321.757.560.-	94,63

*Sumber: RFK dan DPA Perubahan Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi anggaran yang dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,63 %

Adapun Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020, Realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Program/Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Berisi koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan

pameran investasi/promosi daerah dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dari pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp. 129.303.200.- terealisasi sebesar Rp. 121.784.995.- sehingga realisasi anggaran sebesar 94,19 % dan capaian indikator kegiatannya 100 %

2. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Berisi penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dan penyusunan rencana umum penanaman modal. Dari pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp. 62.415.170.- terealisasi sebesar Rp. 54.471.535.- sehingga realisasi anggaran sebesar 87,27 % dan capaian indikator kegiatannya sebesar 100 %

3. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Berisikan Pendataan Perijinan, Pemeriksaan dan pengecekan lapangan pemohon perijinan, Survey indeks kepuasan masyarakat, Sosialisasi perijinan dan Monitoring dan evaluasi perijinan. Dari pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp. 148.308.685.- terealisasi sebesar Rp. 145.501.030.- sehingga realisasi anggaran sebesar 98,11 % dan capaian indikator kegiatannya sebesar 100 %

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut

**Tabel 3.3.3**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	118,32	176.256.530.-	91,44
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	100,30	145.501.030.-	98,11
	Jumlah	2	109,31	321.757.560	94,78

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 109,31 %. Pada sasaran 1 (satu) terdapat tingkat efisiensi sebesar 8,56%, sedangkan pada sasaran 2 (dua) terdapat tingkat efisiensi sebesar 1,89% dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 5,23%. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.3.4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1	118,32	91,44	8,56
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	1	100,30	98,11	1,89
	Jumlah	2	109,31	94,78	5,23